

# TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ISBAT NIKAH ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ARG A MAKMUR NOMOR 0110/PDT.P/2016/PA.AGM DAN NOMOR 0128/PDT.P/2016/PA.AGM

Armalina

Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara  
Email: [armalina.iainbengkulu@gmail.com](mailto:armalina.iainbengkulu@gmail.com)

**Abstract:** Maqasid Syariah is the objective of recommendation for Islamic law, while Isbat marriage is the endorsement of marriages that have been held according to Islamic Shari'a, but not recorded by Religious Affairs Office (KUA) or the Marriage Registry Official (PPN) authorized. The compilation of Islamic Law which has the power of Inpres limits the permissible cases to be attributed. The formulation of this research problem is how the basis of judges' consideration as well as how the analysis of maqasidsyariah to the determination of the case Number 0110 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM and Number 0128 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM about isbat marriage. The research method was used qualitative descriptive analysis that was the data processing obtained in the field study result which then combined with data obtained from literature study, in order to obtain the accurate data. The approach was used the juridical approach. The location of the research was conducted in Arga Makmur Religious Court. Primary data sources obtained through interviews with Judges involved in the establishment of isbat marriage. Secondary data sources was included the legislation and court decisions, coupled with literature relevant to marriageisbat issues. The result of the research was found that judge consideration in the determination of case Number 0110 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM and Number 0128 / Pdt.P / 2016 / PA.AGM on marriage isbat based on juridical, philosophical and sociological considerations. The juridical isbat marriage regulated in the Compilation of Islamic Law through Presidential Instruction Number 1 of 1991. The determination of marriage isbat was supported by the evidence on the facts in the hearing. Maqasid sharia in the case of marriage isbat in Islamic law that is to realize and maintain mashlahat mankind on marital status and status of child in marriage.. The stipulation of marriage isbat provides legal certainty to the legality of marriage both religiously and legally.

**Keywords:** Maqasid Syariah, Marriage Isbat, 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM.

**Abstrak:** Maqasid Syariah merupakan tujuan disyariatkan hukum Islam, sedangkan Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Inpres membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim serta bagaimana tinjauan analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang diperoleh pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh data akurat. Pendekatan digunakan adalah pendekatan yuridis. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Arga Makmur. Sumber data primer didapat melalui hasil wawancara dengan Hakim yang terlibat dalam penetapan perkara isbat nikah. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ditambah dengan literatur yang relevan dengan permasalahan isbat nikah. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan. Maqasid syariah dalam perkara isbat nikah dalam hukum Islam yaitu untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia pada status perkawinan dan status anak dalam perkawinan. Penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara.

**Kata Kunci :** Maqasid Syariah, Isbat Nikah, 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM.

## Pendahuluan

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan

memilih, (4) kemitraan suami-istri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka.<sup>1</sup> Sedangkan rukun perkawinan ada lima, yaitu (1) calon mempelai laki-laki, (2) calon mempelai wanita, (3) wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan, (4) dua orang saksi dan (5) ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan suami.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.139

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.39

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya.<sup>3</sup> Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan.<sup>4</sup> Secara ajaran agama Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka sah secara hukum agama tetapi belum tercatat dalam hukum Negara yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan.

Khusus mengenai perkawinan di bawah tangan yang volumenya sangat banyak, terlepas dari apa penyebabnya, harus ada kesatuan pendapat dan perbuatan dikalangan praktisi hukum untuk mencari jalan keluarnya yang terbaik antara lain dengan isbat nikah, sebab jika tidak, alangkah banyaknya masyarakat Islam yang kehilangan hak-hak keperdataannya.<sup>5</sup> Berkaitan hak keperdataan tersebut dapat berupa tunjangan bagi isteri dan anak-anak, juga berkaitan dengan persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak yang keseluruhannya didapatkan dengan adanya bukti perkawinan yang tercatat dalam hukum Negara.

Isbat nikah dapat membantu masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jika kita lihat dari segi ini, maka sangat sesuai dengan salah satu tujuan adanya pengadilan itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian dan bantuan hukum. Apalagi di zaman sekarang ini, bukti telah melakukan pernikahan di mata hukum menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, misalnya saja untuk mendapatkan warisan, harta gono-gini, dan lain sebagainya. Karena itulah, mungkin bukan hanya Pengadilan Agama Arga Makmur, Pengadilan Agama di daerah lain juga mungkin cenderung untuk mengabulkan isbat nikah asalkan bisa membuktikan telah benar-benar terjadi pernikahan.

Ada beberapa sumber yang mengatur tentang isbat nikah walau mungkin tidak semuanya menyebutkan secara eksplisit, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, keputusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006 serta bahan bacaan lain yang terkait dengan isbat nikah.

Penelitian tentang isbat nikah ini menganalisis tentang aspek tujuan hukum Islam dalam masyarakat dengan menggunakan analisis maqasid syariah. Penelitian ini menganalisis pada penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada perkara isbat nikah.

Pada tahun 2016 terdapat 108 perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Arga Makmur. Acara persidangan perkara tersebut dilaksanakan baik melalui sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Arga Makmur maupun sidang isbat nikah terpadu yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan KUA terkait, sehingga penulis hanya mengambil dua sampel putusan yaitu Penetapan No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Penetapan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam putusan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan siri menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2001 antara Pemohon I yang bersatus jejak dengan Pemohon II berstatus perawan. Kemudian mereka dikarunia dua orang anak yaitu anak pertama seorang perempuan lahir pada tanggal 12 Desember 2002 dan anak kedua seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2012.

Sementara putusan perkara No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 antara Pemohon I yang bersatus jejak dengan Pemohon II berstatus perawan. Kemudian mereka dikarunia satu orang anak yaitu seorang anak perempuan lahir pada tanggal 4 Juni 2016.

Dalam kedua putusan isbat nikah ini pertimbangan hakim, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Dalam pertimbangan lain dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini; bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II un-

<sup>3</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.12

<sup>4</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 281

<sup>5</sup>Damsy Hanan, "Permasalahan Isbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31(Maret-April 1997), h. 80

tuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama.

Kedua putusan ini dipilih untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama karena pernikahannya dilakukan baru dimana pada Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM pada tahun 2001 dan Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM dilakukan pada tahun 2015. Tentu saja dengan dikabulkannya kedua perkara ini tidak sesuai dengan semangat diwajibkannya pencatatan nikah yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Kedua alasan pengajuan pencatatan nikah dalam rangka pembuatan akta nikah. Kompilasi Hukum Islam yang berkekuatan sebagai Inpres membatasi perkara yang dibolehkan untuk diisbatkan. Oleh karena itu penulis tertarik membahas dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut menjadi pembahasan dalam penelitian ini, kajian putusan tersebut dikaitkan dengan teori maqasid syariah sehingga penulis berharap dapat memberikan manfaat ilmiah dalam menganalisis perkara isbat nikah, terutama mengenai penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian tesis dengan judul “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM”, penulis mencoba meneliti, membahas dan menelaah. Semoga hasil dari penelitian ini ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga Islam.

### Permasalahan

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah?
2. Bagaimana tinjauan analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah?

### Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah.
2. Mengetahui dan menganalisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis masalah tentang isbat nikah yang ada pada berkas perkara penetapan. Sumber Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang bertujuan meneliti perkara Isbat Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2016 pada Penetapan Perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan pada Penetapan Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan tesis. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan; sebagai sumber data sekunder; mengetahui historis tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan; memperkaya ide-ide baru.<sup>6</sup>

### Landasan Teori

#### 1. Teori Maqasid Syariah

Kerangka teori sebagai landasan teori dalam penulisan tesis ini dalam menyelesaikan permasalahan isbat nikah yang didukung dengan teori maqasid syariah.

Mengetahui dan memahami Maqasid Syariah secara utuh adalah suatu yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Bahkan Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* mengatakan bahwa: Dalam upaya menggali hukum Islam atau *Istinbat al-ahkam* seorang harus memahami maqasid syariah.<sup>7</sup> Pembahasan maqasid syariah terkait erat dalam *ushul fiqh*, karena *ushul fiqh* adalah pijakan bagi para punggawa hukum dalam berijtihad atau memberikan fatwanya, selain itu maqasid syariah merupakan metode yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah hukum Islam masa kini.

Hukum harus berpedoman pada prinsip-prinsip sesuai dengan keyakinan hati nurani yang juga diperintahkan agama. Agama Islam mengandung suatu pedoman hidup dalam syariah, syariah itu meletakkan fundamen bagi suatu kehidupan sejati.<sup>8</sup>

Hukum menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Suatu Pengantar), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.115

<sup>7</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.245

<sup>8</sup>Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.90

tanpa batas waktu, oleh karena itulah manusia berharap pada hal-hal di bawah ini.<sup>9</sup>

1. Kemashlahatan hidup bagi diri dan orang lain;
2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang baik dan benar;
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum;
4. Saling kontrol di dalam kehidupan masyarakat, sehingga tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri;
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial;
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai al-alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup>

Maqasid Syariah maksudnya adalah tujuan disyariatkan hukum Islam. Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis.<sup>11</sup>

Doktrin atau teori maqasid syariah adalah kelanjutan dari konsep maslahat sebagaimana dicanangkan para ulama sebelum Syatibi. Maqasid Syariah pada dasarnya mengandaikan bahwa kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan.<sup>12</sup> Doktrin Syatibi tentang maqasid syariah adalah upaya untuk menegakkan maslahat sebagai unsur pokok tujuan hukum.

## 2. Isbat Nikah

Isbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, pengiyaan. Isbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh

KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>13</sup>

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Isbat Nikah sebagai sebuah proses penetapan pernikahan dua orang yakni suami istri yang sebelumnya telah melakukan nikah secara Sirri. Tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Isbat nikah dalam KHI dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.<sup>14</sup>

Isbat nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan sebagainya – menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pera-

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) h.243

<sup>10</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h.213

<sup>11</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.124

<sup>12</sup>Mudhorfir Abdullah, *Masail Al Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h

<sup>13</sup>Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Isbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan" artikel diakses pada 23 Maret 2017 dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>



dilan Agama dan penjelasannya). Namun oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi ketentuan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh sebab itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang isbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

### 1. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM

Pada tanggal 30 Agustus 2001 Yun Ahmadi bin Nadar, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Armanila binti Duhmat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Perkawinan dilaksanakan bertempat di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, menurut syariat agama Islam dengan wali ayah kandung Pemohon II, yang bernama Duhmat namun beliau berwakil kepada Mayur, dengan maskawin berupa cincin emas seberat dua gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Pak Rego dan Panhar, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejak dan perawan.

Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabu-

paten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama: Yosi Andini, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2002 dan Raffi Ahmadi, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 2012. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai isteri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Pemoohonannya tertanggal 8 Juni 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 8 Juni 2016. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan Akte Nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Yun Ahmadi bin Nadar) dengan Pemohon II (Armanila binti Duhmat), dari Pengadilan Agama Arga Makmur. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706100607670001, tanggal 20 Mei 2012, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1706084204860001, tanggal 8 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1706082303080557, tanggal 03 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Surat Keterangan Menikah Nomor 112/BT/VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Surat Keterangan dari KUA Nomor 73/Kua.07.05.9/06/2016, tanggal 7 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko.

Maka Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dan

<sup>14</sup>Enas Nasrudin, “Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan),” *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 33 (Juli-Agustus 1997), h.88

gan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2001 di Desa Lumpur Tengah, Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.

- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kasus Posisi Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM**

Pada tanggal 25 Oktober 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Nogi Yuliansyah bin Sihirman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pemohon I dengan Sintia Anita Sari binti Saukani, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon II.

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan bertempat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama Islam dihadapan Imam Masjid Desa Datar Ruyung yang bernama Edi Mahyuni serta dihadiri oleh perangkat Desa tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Saukani, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama : Muslim dan Ujang Hairani, adapun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan status antara jejak dan perawan.

Semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini. Dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Amanda Zefani, lahir tanggal 04 Juni 2016. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama.

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 14 November 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 15 November 2016. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan Akta Nikah, untuk itu perlu adanya pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II (dari Pengadilan

Agama Arga Makmur. Sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703151103950006, tanggal 29 Januari 2015, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703074105990001, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Surat Keterangan Menikah Nomor: B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Surat keterangan Menikah Nomor 123/SKN/DTR/XI/2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2015 di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur yang juga ketua majelis pada kedua perkara tersebut yang diteliti. Menurut beliau dasar.

## **3. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim**

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari

undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.<sup>15</sup>

Secara yuridis dalam pelaksanaan isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa: (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya Akta Nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama bersandar pada ketentuan tersebut di atas menerima perkara isbat nikah serta melakukan penetapannya berpedoman pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad Rifai, aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa: "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

#### **4. Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Isbat Nikah**

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya hakim dibawah lingkungan peradilan agama berpedoman pada prinsip-prinsip asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yakni Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu yang salah satunya meliputi perkara perkawinan.

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, serta hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam hukum beracara perkara perdata khususnya di pengadilan agama maka dapat mengikuti asas-asas yang terkandung dalam naskah risalah Al Qadla, yakni:<sup>17</sup>

##### **1. Kedudukan Lembaga Peradilan**

Keberadaan lembaga peradilan di suatu negara hukumnya wajib dan Sunnah yang harus dilestarikan.

##### **2. Memahami Kasus Persoalan, Baru Memutuskan-nya**

Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada Anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.

##### **3. Samakan Pandangan Anda kepada Kedua Belah Pihak, dan Berlaku Adillah**

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandang mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan Anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.

##### **4. Kewajiban Pembuktian**

Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya.

##### **5. Lembaga Damai**

Penyelesaian perkara secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

##### **6. Penundaan Persidangan**

Barangsiapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia memberi keterangan hendaklah engkau memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tak ada jalan baginya untuk

<sup>15</sup>Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 126

<sup>16</sup>Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, h. 126

<sup>17</sup>H.M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 94-96

mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

#### 7. Kebenaran dan Keadilan adalah Masalah Universal

Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah Anda putuskan pada hari ini, kemudian Anda tinjau kembali putusan itu lalu Anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang Qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.

#### 8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan Penalaran Logis

Gunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada Anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

#### 9. Orang Islam Haruslah Berlaku Adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya haruslah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikannya rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah.

#### 10. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional

Jauhilah diri Anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara khususnya pada isbat nikah, hakim harus berpedoman pada Al Quran dan hadist Nabi, serta ijtihad ulama pada nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam.<sup>18</sup>

Nilai-nilai dalam filsafat hukum Islam, yaitu: satu, nilai keimanan; dua, nilai kepastian hukum, tiga, nilai keadilan; empat, keseimbangan, lima, nilai kemanfaatan dan kemaslahatan; enam, nilai kebebasan dan sukarela, serta tujuh, nilai musyawarah. Nilai-nilai ini merupakan ikatan yang sangat kuat atau tali-temali yang kokoh dalam perkawinan Islam.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Hakim PA Arga Makmur Bapak Drs. Syaiful Bahri, S.H. selaku ketua majelis sidang perkara Penetapan Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM, tanggal 7 Agustus 2017.

<sup>19</sup>Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 88

### 1. Penetapan Perkara Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, dengan Pemohon I Nogi Yuliansyah bin Sihirman dan Pemohon II Sinta Anita Sari binti Saukani.

#### a) **Bukti Surat**

Alat bukti surat berupa:

- 1) Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703151103950006, tanggal 29 Januari 2015, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703074105990001, tanggal 21 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Surat Keterangan Nomor B-262/kua.07.02.04/PW.01/11/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan tidak terdaptarnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- 3) Surat keterangan Nomor : 123/SKN/DTR/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan telah terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

#### b) **Keterangan Saksi**

1) Bahani bin Kasim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.III Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Nogi Yuliansyah yang baru saksi kenal sejak pernikahan, adapun Pemohon II bernama Sinta Anita Sari binti Saukani, dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur tanggal 25 Oktober tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku tetangga dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya bapak kandung Pemohon II yang bernama Saukani, namun beliau berwakil untuk mengadakan pernikahan anaknya yang bernama Sinta kepada Imam Masjid yang bernama Edi Mahyuni dengan Pemohon I yang bernama Nogi;



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa, namun Saksi tidak tahu siapa nama kedua orang Saksi tersebut, karena Saksi duduk dibagian belakang dalam ruangan pernikahan tersebut;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki (Pemohon I) berbentuk uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setuju saksi adalah seorang jejaka, berasal dari Sungai Pura, adapun Pemohon II seorang gadis;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan acara pesta peresmian pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Datar Ruyung dengan hiburan acara Kuda Kepang;
- Bahwa, setuju Saksi setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan baru-baru ini (lebih kurang sebulan) sudah mengotak dirumah family Saksi didaerah tersebut;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, Pemohon I berasal dari Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar atas persetujuan kedua belah pihak, dan pernikahan keduanya dilaksanakan lantaran keduanya telah terlibat pergaulan bebas;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setuju Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setuju Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

2) Ali Bermani bin Jalaludin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. III, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Kota Arga Makmur, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai ber-

ikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah warga satu desa dan bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama Nogi Yuliansyah barasal dari Sungai Pura, Kecamatan Air Besi, adapun Pemohon II bernama Sinta Anita Sari;
- Bahwa, setuju Saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 Oktober tahun 2015, pada waktu itu Saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa, pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun II Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung dihadapan Imam Masjid Desa Datar Ruyung yang Saksi kenal bernama Edi Mahyuni, dihadiri oleh perangkat desa Datar Ruyung;
- Bahwa, setuju saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena keduanya terlibat pergaulan bebas;
- Bahwa, setuju Saksi saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam, karena tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda maupun hubungan sepersusuan dan begitu juga menurut adat setempat yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa, setelah pernikahannya maka di rumah Pemohon II diadakan peresmian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan adanya acara Pesta dengan hiburan kuda kepang;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setuju Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, Saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun II, Desa Datar Ruyung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan

- Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa, isbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

## 2. Pertimbangan Hukum

- Permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2015 di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Bapak kandung Pemohon II yang bernama Saukani, ada dua orang saksi laki-laki yang bernama Muslim dan Ujang Hairani serta mahar uang sejumlah Rp 200.000,00 yang dibayar tunai; antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku. Pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II; selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 1 orang anak;
- Surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur.

Pada kedua penetapan perkara isbat nikah yaitu Penetapan Perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan:

1. Sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai domisili para pemohon serta:

3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara.

## Pencatatan Perkawinan

Dasar bagi pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan hukum berupa bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan kepada para pihak lain secara hukum.

Pada pencatatan perkawinan terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa telah dilaksanakannya suatu pernikahan antara kedua belah pihak antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).
2. Adanya kepastian hukum yang dapat membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak baik bagi suami maupun bagi istri.

Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. Yang dimaksud dengan mawaddah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku (baity jannaty) insya

Allah akan segera terwujud.”<sup>20</sup>

### 3. Analisis Maqasid Syariah pada Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM

Konsep maqasid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia.<sup>21</sup>

Konsep ini menurut Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assarah ar-Risalah, telah diakui oleh para ulama dan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah." Sehingga secara teori Maqasid Syariah, maka tujuan ditetapkannya suatu hukum untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (kerusakan/ akibat buruk), baik di dunia dan di akhirat.

Imam asy-Syathibi dalam kitab *al-I'tisham* menetapkan 3 (tiga) syarat dalam pemakaian maslahat, agar dapat dibenarkan oleh syara', yaitu:<sup>22</sup>

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum dengan syara' yang umum, sehingga tidak mungkin akan berlawanan dengan salah satu aturan pokok atau dalil qath'i dalam Al Quran maupun hadits;
2. Maslahat yang dipertimbangkan sebagai dalil (dasar ilatnya itu harus masuk akal) sehingga apabila diajukan kepada orang-orang yang berpikir, akan menerimanya; dan
3. Pemakaian teori maslahat itu benar-benar akan menghindarkan kesempitan dalam agama, sebaliknya jika maslahat itu tidak digunakan tentu akan menimbulkan mudharat atau kesulitan bagi orang banyak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, ke-butuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Teori maqasid syariah dijelaskan pada lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Hal tersebut bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penetapan isbat nikah kecenderungan pada kemaslahatan Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) dan Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) dalam peringkat daruriyat. Maka menurut penulis isbat nikah memberikan kemahalahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami

kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya.

Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penetapan perkara isbat nikah yakni hukum yang menyangkut bidang muamalah dapat memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Memberikan kepastian hukum secara hukum Negara bagi status sosial seorang muslim baik sebagai suami ataupun istri, serta memberikan kejelasan status anak dalam keluarga yang sah dan tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia.

Pertimbangan hukum dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM telah dapat dibuktikan bahwa telah terjadi sebuah akad nikah antara para yang apabila diamati dari keterangan para saksi yang diajukan pemohon, telah mencukupi syarat-syarat yang dibutuhkan menurut hukum syara'. Terjadinya suatu pernikahan antara dua orang tersebut sebagai anggota masyarakat di tempatnya. menurut sifatnya adalah sesuatu yang sangat sulit dibohongi. Sebab, sebuah perkawinan, sekecil apa pun acaranya akan mengundang perhatian publik. Apabila suatu perkawinan dapat disembunyikan dari pengetahuan publik di sekitarnya, tetapi akad nikah itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh dua orang (laki-laki perempuan) saja, tetapi mesti melibatkan beberapa orang, yang sekurang-kurangnya wali nikahnya harus hadir dan berperan menikahkan, serta kemestian hadirnya dua orang saksi yang dipercaya. Dengan hadirnya beberapa orang pihak ketiga, maka akad nikah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dirahasiakan, dan pada waktu yang sama akad nikah itu dapat ditelusuri kebenaran adanya dalam satu komunitas.<sup>23</sup>

Apabila dibutuhkan, maka para saksi berkewajiban memberikan kesaksiannya secara jujur di depan hakim untuk mengatakan yang sebenarnya apakah betul telah terjadi akad nikah antara dua orang (laki-laki perempuan). Bahkan jika penegak hukum secara aktif ingin mencari kebenaran ke lapangan, maka setiap orang yang hadir dalam acara akad nikah itu bisa dimintai keterangannya tentang peristiwa tersebut.

Bilamana terbukti telah terjadi akad nikah antara

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 27

<sup>21</sup>Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, h.60

<sup>22</sup>Achmad Hanafi dalam Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, h. 61

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Hakim PA Arga Makmur Bapak Drs. Syaiful Bahri, S.H. selaku ketua majelis sidang perkara Penetapan Isbat Nikah Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM, tanggal 7 Agustus 2017.

para pemohon maka permasalahannya bagaimana sikap penegak hukum dalam menilai sebuah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan pengertian tanpa mencatatkannya pada badan yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini menguraikan masalah tersebut dengan mengutip pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekh al-Azhar yang yakni Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq. Dalam fatwa ulama tersebut adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori :<sup>24</sup>

1. Peraturan syara, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhabnya yang pada intinya adalah, kesediaan adanya ijab dan kabul (qabul) dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurut ulama besar ini, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan anak dari hubungan suami isteri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.
2. Peraturan yang bersifat tawtsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mem-

punyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam itu, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Dalam buku al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar'i dan syarat tawtsiqy. Syarat syar'i, maksudnya suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan Syarat tawtsiqy adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai alat antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawtsiqy bukan merupakan syarat sahnya suatu perbuatan tetapi sebagai bukti di kemudian hari atau untuk menertibkan suatu perbuatan. Misalnya, hadirnya dua orang saksi dalam akad jual beli adalah sebagai syarat tawtsiqy bagi akad jual beli. Dalam hal ini, syarat dua orang saksi fungsinya sebagai bukti di belakang hari bahwa akad jual beli memang benar telah terjadi. Syarat adanya dua orang saksi dalam berbagai bentuk akad adalah termasuk ke dalam kategori syarat semacam ini, kecuali kehadiran dua orang saksi untuk akad nikah adalah syarat syar'i karena merupakan syarat sahnya perkawinan di samping sebagai syarat tawtsiqy. Akad nikah tidak sah tanpa dihadiri dua orang saksi.<sup>25</sup>

Fatwa Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq dan apa yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili tersebut, petugas yang berwenang dapat membedakan mana di antara ketentuan perundang-undangan yang memang ada pengaruhnya terhadap sah atau batalnya pernikahan dan mana yang hanya merupakan syarat administratif belaka, tanpa ada pengaruhnya terhadap sah dan batalnya suatu perkawinan.

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, disamping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang itsbat nikah seperti tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama ter-

<sup>24</sup>Satria Effrendi M Zein, "Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah," *Mimbar Hukum*, No. 50 Tahun XII 2001, h. 117

<sup>25</sup>M Zein, "Analisis Yurisprudensi tentang Itsbat Nikah", *Mimbar Hukum*, h. 118



batas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian ayat (4) berbunyi: Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam kaitannya dengan fatwa Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jad al-Haq tersebut di atas, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini menarik untuk disimak. Sebab, asumsi penulis, justru menyadari prinsip yang sejalan dengan fatwa Syekh Jaad al-Haq 'Ali Jaad al-Haq itulah pasal 7 ini dirumuskan. Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia tadi itu mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nikah itu dapat dicatatkan dan diitsbatkan alias diakui secara administratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang lain, dengan adanya pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan pada waktu yang sama merupakan tanggung jawab badan yang berwenang untuk merealisasi terwujudnya peluang tersebut.

Beberapa hal mengenai pentingnya suatu akad nikah dicatatkan:

1. Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.
2. Dalam Syari'ah Islam ditetapkan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tidak dapat menjanjikan lagi maka penacatatan nikah menjadi hal yang representative untuk mencapai tujuan masalah.
3. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbu-

tan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah.<sup>26</sup>

Tujuan pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Selain itu disebutkan dalam UU No.2 tahun 1946 bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa: "Maksud pasal ini ialah agar nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan."<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.

## Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis isbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Penetapan perkara isbat nikah didukung oleh pembuktian pada fakta-fakta dipersidangan yang menyakinkan hakim bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan juga dengan adanya bukti administrasi dan keterangan para saksi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai

<sup>26</sup><https://aljurem.wordpress.com/2012/05/08/pencatatan-perkawinan-dalam-hukum-islam/>

<sup>27</sup>Nasution, Khoirudin, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: ACADEMIATAZZAFA, 2009), h. 336

budaya yang hidup dalam masyarakat.

2. Analisis maqasid syariah terhadap penetapan perkara No. 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan No. 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM tentang isbat nikah. Maqasid syariah dalam perkara isbat nikah dalam hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara mashlahat umat manusia khususnya pada kehidupan perkawinan, terhadap status perkawinan, status anak dalam perkawinan. Isbat nikah memberikan kemahalahatan pada tingkatan daruriyat, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan permasalahan perkawinan lainnya. Adanya Penetapan perkara tersebut ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum pada legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun secara hukum negara sehingga tujuan hukum tercapai.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Mudhorfir, *Masail Al Fiqhiyyah, Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fauzan, H.M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hanan, Damsyi, "Permasalahan Itsbat Nikah: Kajian Terhadap Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI," *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 31, Maret-April 1997.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Usul Figh Mahab Sunni*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hakim, Robith Mutiul, "Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.6/2004/PA.SMN dan Putusan No.1512/Pdt.6/2015/PA.SMN)," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan, Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram dalam Pernikahan*, Jogjakarta: Multi Publishing, 2013.
- Manan, Bagir, "Hukum Materiil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXV No. 294 Mei 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Maratus, Nuril Farida, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Mas'adi, Ghuftron A, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan*, No. 290 Januari 2010.

